

SAMA PANWAS PILKADA KOTA YOGYA, FH UNIV WIDYA MATARAM - KR (1)

Bersama Masyarakat Mengawasi Pilkada

MEMASUKI masa pendaftaran pasangan calon masyarakat Kota Yogya dibuat *dag-dig-dug* masa penasarannya terhadap jadi atau tidaknya Pilkada. Faktanya adalah belum dapat dipastikan adanya pasangan calon yang mendaftar. Apakah betul yang ditakutkan KPUD dan kita semua, bahwa Pilkada kota akan gagal lagi. *Sampai maning!*

Bukti ketakutan KPUD adalah amandemen regulasi teknis pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, intinya adalah antisipasi teknis yuridis apabila muncul kembali "satu pemain" yang dapat menggagalkan Pilkada Kota Yogyakarta. Proses penentuan dan pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik bagi masyarakat semakin menarik hingga sampai 10 September 2006 ditambah 3 hari perpanjangannya.

Apakah amandemen regulasi teknis tersebut dapat menjadi obat mujarab atas ketakutan kita sehingga mendorong partai politik berani mendominasi pemainnya dalam pertandingan "Pilkada Cup" Kota Yogyakarta? Terlepas dari muatan atau tidaknya amandemen regulasi KPUD tersebut, masyarakat seyogiannya bersama-sama mencermati dan mengawasi proses pelaksanaan Pilkada Kota yang puncaknya berlangsung tanggal 26 November 2006. Walaupun tugas pengawasan menurut undang-undang dibebankan kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Yogyakarta, namun demikian tidak ada salahnya masyarakat memahami sedikitnya lima hal yang menjadi fokus perhatian seandainya Pilkada diniatkan jalan terus.

Pertama, saya melihat ada rasa marah dari masyarakat Yogyakarta terhadap kegagalan partai politik dalam mempersiapkan pemain untuk ikut pertandingan. Bukannya Yogyakarta sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Seharusnya sangatlah mudah mencari orang dengan kualifikasi *linuwih* di kota Yogyakarta ini, misalnya, memiliki kecakapan dalam memimpin, mengelola administrasi pemerintahan, manajemen keuangan daerah sekaligus me-

iliki ketrampilan manajerial dan juga memiliki integritas moral dalam wujud pribadi yang berakhlak mulia.

Kegagalan partai politik di dalam mengusung pemain akan menerjunkan kondisi Kota Yogyakarta ke dalam lingkaran problem yang kait-mengait terutama berkaitan dengan citra kota Yogyakarta ke depan.

Kedua, pelaksanaan Pilkada akan berlangsung tanpa *incumbent*. Hal ini dikarenakan masa jabatan walikota dan wakil walikota Yogya-

HM Zaki Sierrad

lakukan pengawasan karena praktis hal ini tidak akan terjadi.

Ketiga, jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan setelah bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, dengan didahului penetapan pasangan calon dengan gambar dan nomor urutnya sebelum Ramadan tepatnya tanggal 22 September 2006 oleh KPUD. Akibat yang hampir pasti adalah penggunaan momentum berkumpulnya masa selama Ramadan dan juga Syawal oleh tim sukses guna melakukan kegiatan yang terma-

Akhirnya, penting dicatat, bahwa selama ini masyarakat telah menjadi saksi seluruh proses pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta. Kesaksian ini merupakan buah dari langkah aktif masyarakat dalam mendorong partai politik untuk berpartisipasi dalam pencalonan "pemain" Pilkada. Kinilah saatnya partai politik *gentian nulung* masyarakat keluar dari krisis peralihan kepemimpinan. Masyarakat pasti akan mencatat dan menyaksikan. Bukankah begitu kawan?

karta akan habis tanggal 17 September 2006. Pilkada tanpa pemain *incumbent* yang masih menjabat akan menjadikan pelaksanaan Pilkada lebih seimbang dan lebih "fair" dalam kompetisi, sehingga tidak ada alasan untuk takut ikut Pilkada. Biasanya dalam setiap Pilkada ditemukan kasus pemanfaatan birokrasi dan dana APBD guna menyaringkan popularitas *incumbent* di media melalui peresmian proyek APBD atau melalui dukungan birokrasi. Di Yogyakarta, Panwas akan lebih gampang dalam me-

suk "curi start" kampanye.

Keempat, Pilkada Kota Yogya dibayangkan yang bentuk kampanye berkategori *money politics*. Praktik politik uang, misalnya dengan pembagian semen, sumbangan pembangunan masjid, fasilitas pendidikan atau lainnya akan subur dilakukan dalam situasi pasca gempa. Apabila itu dilakukan pada masa normal, maka akan mudah mengawasi dan "menyempritnya". Namun apabila dilakukan saat di mana masyarakat masih menanti uluran tangan sumbangan,

menunggu proses pendaftaran calon tersebut. Hemat saya, Panwas bersama masyarakat hendaknya selalu bergandengan tangan dalam mengawasi beberapa titik krusial penyelenggaraan Pilkada pasca gempa. Pengawasan bersama menjadi mutlak dilakukan agar proses Pilkada dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai kepastian, moral serta hukum yang berlaku, sehingga pemimpin terpilih dapat berfungsi sebagai penolong masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

Akhirnya, penting dicatat, bahwa selama ini masyarakat telah menjadi saksi seluruh proses pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta. Kesaksian ini merupakan buah dari langkah aktif ma-

sarakat dalam mendorong partai politik untuk berpartisipasi dalam pencalonan "pemain" Pilkada. Kinilah saatnya partai politik *gentian nulung* masyarakat keluar dari krisis peralihan kepemimpinan. Masyarakat pasti akan mencatat dan menyaksikan. Bukankah begitu kawan? □ - g

*) HM Zaki Sierrad SH CN MH
Direktur Eksekutif Laboratorium Hukum &
Dosen FH Universitas Widya Mataram
Yogyakarta, Ketua Panitia Pengawas
Pilkada Kota Yogyakarta. Tulisan ini
pendapat pribadi penulis.